

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Adji, Indriyanto Seno, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta.

Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2013, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta.

Azwar, Saifuddin, 2005, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Chazami, Adawi, 2017, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Korupsi)*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

Hamzah, Andi, 1991, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Hiariej, Eddy. O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Isra, Saldi dan Eddy. O.S. Hiariej, 2009, *Perspektif Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie (Editor), Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.

Kaligis, O.C., 2014, *Praktik Tebang Pilih Perkara Korupsi Jilid 2*, PT. Alumni, Bandung.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk Membasmi, Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi Press, Jakarta.

Krustina, Yudi, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Persepektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.

Kurniawan, Luthfi J, dkk, 2003, *Menyingkap Korupsi di Daerah*, In-Trans, Malang.

Lamintang, P.A.F., 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Latif, H. Abdul Latif, dkk., 2009, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta.

Mahfud, Moh., 2011, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press.

Muladi dan Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, CV Citra Aditya Bakti, Bandung.  
Nurdjana, IGM, *Sistem Hukum dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Hukum"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Poernomo, Bambang, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.

Pramono, Widyono, 2016, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa & Guru Besar*, Kompas, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Salama, Nadiatus 2010, *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo, Semarang.

Saputra, Dwi, et.al., 2004, *Tiada Ruang Tanpa Korupsi*, KP2KKN Jawa Tengah, Semarang.

Semitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Shoim, Muhammad, 2009, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi Pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo, Semarang.

Siahaan, Maruarar, 2005, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.

Soekamto, Soerjono, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanski*, Remadja Karya, Bandung.

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Surachmin dan Suhandi, 2011, *Strategi & Teknik Korupsi*, Sinar Grafika,

Jakarta.

Sutiyoso, Bambang, 2009, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta.

Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wiyono, R., 2016, “Pemahasan Undang-Undang Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua”, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lemabran Negara Tahun 1981 Nomor 176.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi Tahun Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98.

Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Tahun 2004 Nomor 5.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

## **C. PUTUSAN PENGADILAN**

Purtusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

#### D. KARYA ILMIAH

Ita Billa Thifa, 2017, Prospek Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Setelah Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Dadin. E. Saputra, 2018, Implikasi Hukum Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjari.

Adhi, Yoseph Adwitya, 2019, *Analisis Yuridis Normatif Penentuan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

#### E. INTERNET

Humas KPK “Indeks Persepsi Korupsi 2017, Skor Indonesia di Angka 37”, <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/229-indeks-persepsi-korupsi-2017-skor-indonesia-di-angka-37> diakses tanggal 10 September 2019 pukul 16.40 WIB.

<https://kbbi.web.id/efektif>, diakses pada tanggal 2 Maret 2020, pukul 10.12 WIB

Faiw Hidayat, “Wakil Tuhan di RI Tercokok KPK (Lagi), diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4322115/wakil-tuhan-di-ri-tercokok-kpk-lagi>, pada tanggal 5 Maret 2020 pukul 12.55.

Sholahudin Al Ayyubi, “Kejagung Periksa Penyup Oknum Jaksa Kusnin”, diakses dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20191101/16/1165830/kejagung-periksa-penyup-oknum-jaksa-kusnin>, pada tanggal 5 Maret 2020 pukul 13.08.

Beni Harefa, “Pasal Keranjang Sampah”, <http://beniharmoniharefa.blogspot.com/2015/05/pasal-keranjang-sampah.html>, diakses tanggal 9 Maret 2020 pukul 18.30.